

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Medan Belawan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Belawan berbatasan dengan:

1. Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat dan timur,
2. Medan Marelan dan Medan Labuhan di sebelah selatan, dan
3. Selat Malaka di sebelah utara.

Luas Kecamatan Medan Belawan adalah 21,82 Km² yang terdiri dari 6 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Medan Belawan adalah sebanyak 4.152/Km². kecamatan Medan Belawan terdiri dari 6 kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Belawan I
- b. Kelurahan Belawan II
- c. Kelurahan Belawan Bahagia
- d. Kelurahan Belawan Bahari
- e. Kelurahan Belawan Sicanang
- f. Kelurahan Bagan Deli

Salah satu dari 6 kelurahan yang ada di Medan Belawan yaitu Kelurahan Belawan Bahari yang mana Kelurahan Belawan Bahari merupakan gerbang pintu masuk Kecamatan Medan Belawan dengan luas 169 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Belawan II
2. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai deli
3. Sebelah timur berbatasan dengan sungai deli
4. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan belawan sicanang

Wilayah Kelurahan Belawan Bahari dengan luas 169 Ha terdiri dari :

- a. Jumlah Lingkungan : 13 Lingkungan
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 2187 KK
- c. Jumlah Jiwa : 11.916 jiwa

4.1.2 Karakteristik Informan

Wawancara penelitian dilakukan terhadap informan yang bersangkutan mengenai Implementasi Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan, yaitu Ketua Tim Lingkup Bina Keluarga dan Balita Bidang Keluarga Sejahtera Dinas DP3APMP2KB, Teknikal Asisten Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Bidang Keluarga Sejahtera Dinas P3APMP2KB, Kader KB dan TP PKK serta Bidan di Kecamatan Medan Belawan, dan 3 Ibu yang memiliki balita Stunting di Kecamatan Medan Belawan. Adapun karakteristik informan berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat pada table 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Jabatan	Keterangan
1.	IK-1	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas P3APMP2KB	Informan Kunci
2.	IU-1	Ketua Tim Lingkup Bina Keluarga dan Balita Bidang Keluarga Sejahtera Dinas P3APMP2KB	Informan Utama

3.	IU-2	Teknikal Asisten Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Bidang Keluarga Sejahtera Dinas P3APMP2KB	Informan Utama
4.	IU-3	Bidan di Kecamatan Medan Belawan	Informan Utama
5.	IP-2	Kader TP PKK di Kecamatan Medan Belawan	Informan Pendukung
6.	IP-3	Kader KB di Kecamatan Medan Belawan	Informan Pendukung
7.	IP-1	Ibu yang memiliki balita Stunting	Informan Pendukung
8.	IP-2	Ibu yang memiliki balita Stunting	Informan Pendukung
9.	IP-3	Ibu yang memiliki balita Stunting	Informan pendukung

4.2 Hasil Wawancara

4.2.1 Implementasi Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting

a. Sumber Daya

1. Petugas/Pelaksana (SDM) yang tersedia dalam Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa SDM yang tersedia dalam program pendampingan keluarga resiko Stunting di Kota Medan tersebut yaitu ada 1.116 tim yang tersebar di 21 kecamatan yang terdiri dari satu tim itu ada 3 orang yaitu Kader KB, Kader TP PKK, dan Bidan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“tim pendamping keluarga di Kota Medan itu kan ada 1.116 tim, jadi 1.116 tim itu satu timnya ada 3 orang (Bidan, Kader TP PKK, Kader KB)” (IU-1)

“tim pendamping keluarga beresiko stunting itu kan didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga. Nama timnya Tim Pendamping Keluarga itu terdiri dari 3, yaitu Ibu PKK, terus Bidan, dan satunya lagi Kader KB. Nah, jumlahnya untuk

di Kota Medan itu ada sebanyak 3048 orang atau 1.116 tim yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang tersedia dalam program pendampingan keluarga resiko Stunting yaitu terdiri dari 1 tim berjumlah 3 orang yaitu Bidan (dari kesehatannya), Kader PKK, dan Kader KB dalam satu tim pendampingan keluarga resiko Stunting. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“yang bertugas melaksanakan program pendampingan Stunting semua di dinas kita ini bertugas. Tapi sebagai pendamping tim pendamping keluarga, tim pendamping keluarga itu terdiri dari satu tim 3 orang yaitu dari kesehatannya, dari PKK nya, dari Kader KB nya” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas P3APMP2KB Kota Medan bertugas memberi arahan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar melaksanakan tugas yang telah diberitahukan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

2. Dana yang tersedia dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa setiap petugas/pelaksana program (Kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan) tersebut diberikan biaya operasional sebesar Rp. 100.000/orang untuk biaya pulsa dan Rp. 330.000 untuk 3 orang sebanyak 10 kali yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“kalau dana dari TPK ya khususnya TPK itu dia dana dari pusat, DAK BOKB namanya kan. Jadi, setiap TPK itu satu tim itu kalok di kakak ya dibagian di khususnya di KS jadi mereka melakukan pendampingan itu kan pakai pulsa masukkan ke aplikasi itu. Nah, itu pas melakukan ke aplikasi itu kita kasih juga

itu juga biaya untuk pulsanya Rp. 100.000/orang. Jadi, kan ada 3.048 jadi 1 bulan itu ada 1 kan 10 kali ya setahun jadi dia dapat pulsa 1 orangnya itu Rp. 100.000 di 3.048 orang. Kalau melakukan pendampingan kesana kemari biaya transportnya segala macamnya nah itu di kakak itu dia per tim. Pertim itu Rp. 330.000 untuk 3 orang” (IU-1)

“tim pendamping keluarga itu mendampingi keluarga beresiko stunting itu gak Cuma mendampingi ada fasilitasi yang diberikan oleh BKKBN melalui Dana Alokasi Khususnya, kalau bahasanya disini operasional. Operasional tim pendamping keluarga biaya pulsa setiap kader setiap bulan selama 10 kali sebesar Rp. 100.000 dan biaya operasional untuk biaya pendampingannya Rp. 330.000/tim selama 10 kali juga” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa infrastruktur/sarana dan prasarana yang tersedia dalam program pendampingan keluarga resiko Stunting yaitu diberikannya honor dan biaya pulsa kepada tim pendamping keluarga setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“kita dinas kita memfasilitasi misalnya kepada tim pendamping keluarga itu seperti honor mereka perbulan sama uang pulsanya juga setiap bulan” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas P3APMP2KB Kota Medan memberi fasilitasi kepada TPK seperti honor mereka setiap bulannya.

3. Fasilitas (sarana dan prasarana) yang tersedia dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada indorman utama diketahui bahwa fasilitas yang tersedia dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting tersebut terdiri dari Posyandu, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

*Kalau di daerah ada puskesmas, posyandu, ya ada juga rumah sakit (IU-1)
Ada juga fasilitas yang tersedia seperti biasanya yang ada di setiap daerahla dek (IU-2)*

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting tersebut terdiri dari fasilitas kesehatan seperti biasanya yang ada pada setiap daerah yakni Posyandu, Polindes, Puskesmas dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

Kalau di lapangan itu tersedia layanan kesehatan atau faskes dek (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa di setiap daerah telah tersedia fasilitas layanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah.

b. Komunikasi

1. Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa komunikasi yang terjalin dalam program pendampingan keluarga resiko Stunting tersebut dilakukan dengan baik secara berjenjang yaitu informasi yang diberikan bidang KS Dinas P3APMP2KB Kota Medan kepada Tenaga Lini Lapangan, kemudian disampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga yang ada di lapangan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“komunikasi yang terjalin dengan TPK ini berjenjang ya dek. Kalau kita kan di dinas, yang kerja kan petugas lapangan ya” (IU-1)

”komunikasi yang terjalin? Pelaksananya ini kami atau TPK nya. Jadi, kami komunikasinya berjenjang dek. Jadi, koordinasinya kordinasi berjenjang. Selain TPK jadi kita ini punya Tenaga Lini Lapangan. Tenaga Lini Lapangan ada PKB, PKB itu Penyuluh KB di lapangan ada tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan. Itu PNS ya sama kayak temen-temen disini. Selanjutnya selain PKB ada Sub PKKBD, ada jugak TPK dibawahnya. Nah jadi, kalok mengumpulkan kek tadi kan 3.048 orang tidak cukup aulanya kek gitu untuk mengumpulkan segitu banyak massa. Jadi kita mengumpulkannya biasanya PKB nya. Jadi ada serratus, eee... saya kurang hapal angka pastinya cuman ada seratus sekian orang PKB yang dikumpulkan nanti informasi yang kita kasih atau update apa aja yang kita kasih biasanya diinfokan sama PKB itu untuk diteruskan kepada teman-teman di

lapangan seperti itu. Jadi kalau komunikasinya baik sih. Tidak ada kendala yang berarti” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin dalam program pendampingan keluarga resiko Stunting tersebut sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“terlaksana dengan baik. makanya di Kota Medan kan alhamdulillah tercapai ya penurunan Stuntingnya” (IK-1)

Pernyataan informan kunci diatas sejalan dengan pernyataan informan pendukung sebagai berikut:

“ya baik, setiap kader memberi arahan selalu dituruti dan selalu direspon bagus” (IP-1)

“yakan kita sering dia kita ajak dia untuk ini. Itukan ada bantuan makanan dari itu kita aeahkan dia ke Kantor Lurah itu waktu itu kami kan disitu bikin masak bikin apa makanan tambahan. Dibawaklah kami, abis itu ada bantuan lagi diantarlh lagi kemari makanan setiap hari dijemput diantar itulah ya kita” (IP-2)

“baik” (IP-3)

“ya cukup baik” (IP-4)

“baik” (IP-5)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para TPK yang bertugas di lapangan selalu memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

c. Struktur Birokrasi

1. Peran dan tugas pelaksana program dalam pelaksanaan Program Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa bidang KS Dinas P3APMP2KB Kota Medan ditunjuk sebagai sekretariat TPPS di Kota Medan dan bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan

program pendampingan keluarga resiko Stunting tersebut. Sedangkan Kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan yang ditugaskan sebagai pelaksana program di lapangan yang mana Bidan sekaligus bertugas sebagai koordinator dan pemberi pelayanan kesehatan di lapangan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“kalau di bidang KS ya. pendampingan kalok di bagian kami itu kan yang ngurusin Tim Pendamping Keluarga. Tim Pendamping Keluarga di Kota Medan itu kan ada 1.016 tim. Jadi, 1.016 tim tu, 1 timnya ada 3 orang. Nah, jadi di tugas kami itu, kami yang berkoordinasi dengan petugas di lapangan. Petugas lapangan juga nanti eeem mengkoordinasi juga ke TPK nya untuk mendampingi keluarga beresiko stunting. Jadi, kan itu ada targetnya ya dari data bagian KB data KRS namanya, Keluarga Beresiko Stunting. Nah, KRS itu nanti yang bakal didampingi oleh TPK kami” (IU-1)

“khusus pendampingan keluarga resiko stunting ya, kalau bidang KS ini kalau untuk pendampingan keluarga resiko stunting kegiatannya ada di bidang ini jatuhnya. Jadi, kegiatannya itu ada di bidang ini jadi Tim Pendamping Keluarga. Keluarga beresiko stunting itu kan didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga. Nama, nama timnya itu Tim Pendamping Keluarga itu terdiri dari 3 yaitu ibu PKK, Bidan, satunya lagi Kader KB. Nah, jumlahnya untuk di kota medan itu ada sebanyak 3.048 orang atau 1.016 tim. Jadi, ada 1.016 tim yang tersebar di 21 Kecamatan di kota Medan. Nah, itu ada di bawah ini, maksudnya bidang inilah yang menangani. Nah, tim pendamping keluarga itu mendampingi keluarga bersiko stunting itu gak cuma mendampingi. Ada fasilitasi yang diberikan oleh BKKBN melalui Dana Alokasi Khususnya dalam bahasanya disini operasional. Operasional Tim Pendamping Keluarga, eee biaya pulsa setiap kader setiap bulan selama 10 kali sebesar Rp. 100.000 dan biaya operasional untuk biaya pendampingan Rp. 330.000/tim selama 10 kali juga. Jadi yang ngurusin itu bidang inilah. Selain mengurus itu bidang ini juga merupakan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting. Jadi, kota Medan itu kan punya TPPS namanya. Nah, bidang ini secara khusus ditunjuk sebagai sekretariat TPPS seperti itu” (IU-2)

“itu gini mendampingi, memberi penyuluhan pada ibu-ibu hamil, pada anak tentang bagaimana kesehatan kehamilannya, kontrol dia, gizinya, makannya. bagi yang seperti itu penyuluhan seperti itu aja. lihatlah gimana apanya kalau dia tiap bulan itu kalau lagi posyandu, tensi ya, menimbang berat badannya. Itu ajalah lihat lingkaran cek kesehatannya lah. Lihat itu apa berat badannya, ideal gak untuk ibu hamilnya, ada gak resikonya, ada gak pendarahannya. Kan banyak seperti kan ibu hamil ini kan, ya muntah, mual, gimana cara mengatasinya seperti itu. Ibu hami kan kebanyakan kadang kalau di awal trimester itu kan gak mau makan, muntah, mual” (IU-3)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa peran dan tugas bidang KS dalam program pendampingan

keluarga resiko Stunting tersebut adalah mengevaluasi dan memonitoring tim pendampingan keluarga resiko Stunting sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“tugas kita mengevaluasi, monitoring tim TPK itu apakah benar melaksanakan tugasnya mendampingi sasaran keluarga beresiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang mempunyai balita, keluarga catin (calon pengantin), pasca persalinan. Jadi kita memastikan apakah mereka benar-benar sudah mendampingi dengan cara ada aplikasi Elsimil kita bisa melihat berapa orang yang sudah didampingi oleh TPK” (IK-1)

Pernyataan informan kunci diatas sejalan dengan pernyataan informan pendukung sebagai berikut:

“ya kami ibaratnya mendata gitu kan mendata misalnya kayak ada yang mau menikah kan mendatangi kami, catinnya mendatangi kami untuk melakukan apa buat sertifikat itu tadi mendaftarkan ke Elsimil, apa mendata balita, mendata ibu hamil, mendampingi pasca melahirkan” (IP-1)

“Kalau Tim Pendampingan Keluarga (TPK) ini kan dari 0-2 tahun aja. Itu udah selesai, sementara anak ini sekarang udah hampir 4 tahun. Dulu dilakukan pendampingan, itu pun waktu dilakukan pendampingan dia udah berumur 2 tahun lebih, bukan dari 0” (IP-2)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Pendamping Keluarga bertugas untuk mendata semua keluarga risiko stunting yakni balita, ibu hamil, dan ibu pasca melahirkan dan mendaftarkan ke aplikasi Elsimil.

2. SOP dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa SOP dalam program tersebut belum tersedia namun ada JUKNIS. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“SOP nya kami belum ada buat ya, Cuma kana da JUKNIS” (IU-1)

“ada JUKNIS nya ya” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa belum tersedianya SOP dalam program pendampingan keluarga resiko

Stunting tersebut, namun ada JUKNIS untuk pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“SOP saya rasa itu setau saya adanya JUKNIS (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga risiko stunting tersebut. Namun sudah tersedianya JUKNIS sebagai pedoman pelaksanaan program tersebut.

3. Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa belum dilakukannya monitoring dan evaluasi pada tahun ini oleh bidang KS Dinas P3APMP2KB. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“untuk tahun ini belum” (IU-1)

“sekarang ini belum dilakukan monitoring” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan utama yang menyatakan bahwa belum dilakukannya monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan pada tahun ini, namun hal tersebut dapat dilihat melalui aplikasi Elsimil yang memuat laporan TPK yang sudah menjalankan tugasnya atau belum serta berapa jumlahnya setiap bulan dalam pelaksanaan program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“belum ya untuk tahun ini belum. Untuk tahun ini karena kan ini masih tahun berjalan ya, mungkin akhir tahun kita usahakan. Tapi kalau dipikir-pikir evaluasi monitoring melalui kerja mereka kan mereka melaporkan ke dinas setiap bulannya. Itu kan merupakan kita juga tau kecamatan mana yang belum ada TPK nya mendampingi, berapa jumlahnya setiap bulannya. Tapi mungkin bukan turun ke lapangan tapi mereka memberikan data kepada kami” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa belum dilakukannya monitoring dan evaluasi pada tahun ini oleh Dinas P3APMP2KB Kota Medan.

4. Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan utama diketahui bahwa Implementasi (Pelaksanaan) Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik yakni sekitar 70% walaupun masih ada sedikit kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“Kalau dari hasilnya dari 2023 kemaren kan targetnya itu sekitar 80% ya, targetnya. Jadi, yang udah tercapai itu 70 persenan. Kenapa gak tercapai target full itu karena ada beberapa kecamatan di Kota Medan itu yang dia gak ikut verwal. Jadi, ketika TPK itu mendatangi suatu KRS dia itu ada yang udah pindah, ada yang dia udah gak disitu lagi gitu, ada yang sudah level tidak ada lagi. Jadi, disitu sih makanya gak tercapai kek gitu. Belum lagi di lapangan ada juga laporan bahwa kayak pasangan usia subur itu kan masih malu-malu dan malas untuk mengikuti program ini. Mereka menganggap program ini belum terlalu penting untuk diikuti saat masih remaja. Tapi untuk tahun 2024 pendampingan kami termasuk yang banyak ya paling stabil sampai dengan bulan ini ya di Sumatera Utara” (IU-1)

“sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Cuma memang dalam pelaksanaannya tidak ada program yang 100 % berhasil. Pasti ada kendala tantangan ya itu juga dihadapi tim pendamping keluarga dalam mendampingi keluarga beresiko stunting itu” (IU-2)

“alhamdulillah sampai saat ini enggak ada ya ha. Kalau hambatannya itu tadi ya kadang dari orangnya ada yang ngeyel dan gamau mengikutinya. Tapi alhamdulillah itu hanya sedikitlah hanya berapa persen aja. Itu ajanya.” (IU-3)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa dalam implementasi (pelaksanaan) program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa hambatan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“ya sampai saat ini berjalan dengan baik” (IK-1)

Pernyataan informan kunci diatas sejalan dengan tabel realisasi capaian perjanjian kinerja ta 2023 DP3APMP2KB Kota Medan sebagai berikut:

Lampiran Supat
Nomor
Tanggal
Doc. 1-5-5/169
08 Januari 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	NETERANGAN
1	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkembang	151 kelompok	151	100	TERCAPAI
2	Indeks Pembangunan Gender	94,1	93,85	99,7	BELUM TERCAPAI (DATA DARI BPS TAHUN 2022, UNTUK TAHUN 2023 DATA BELUM DI RILIS)
3	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	PRATAMA	-	BELUM TERCAPAI
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,41	64,31	99,84	BELUM TERCAPAI (DATA DARI BPS TAHUN 2022, UNTUK TAHUN 2023 DATA BELUM DI RILIS)
5	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Madya	-	BELUM TERCAPAI
6	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	92%	92%	BELUM TERCAPAI
7	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	50,31%	53,11%	100%	TERCAPAI
8	Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	25,10%	19,78%	100%	TERCAPAI
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	57,10%	78,95%	100%	TERCAPAI
10	Total Fertility Rate (TFR)	2,13%	1,90%	100%	TERCAPAI
11	Cakupan Pendampingan Keluarga Resiko Stunting	85%	73,33%	86,27%	BELUM TERCAPAI
12	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	100%	100%	100%	TERCAPAI


 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN

 Dra. EDLIATY, M. AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660804 198603 2 002

5. Hambatan dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan wawancara dengan informan utama, diketahui adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya KRS yang sudah pindah, pendataan keluarga yang belum diupdate, ada yang sudah meninggal, dan ada yang sudah tidak masuk sasaran lagi atau kebalikannya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“ada beberapa kecamatan di Kota Medan itu yang dia gak ikut verval. Jadi, ketika TPK itu mendatangi suatu KRS dia itu ada yang udah pindah, ada yang dia udah gak disitu lagi gitu, ada yang sudah level tidak ada lagi. Jadi, disitu sih makanya gak tercapai kek gitu” (IU-1)

“hambatannya pertama pendamping keluarga itu kan mendampingi keluarga resiko Stunting. Ada sasarnya, ada daftar sasarnya. Daftar sasarnya ini

namanya PK (Pendataan Keluarga) nama sarannya kek gitu. Pendataan keluarga ini kadang-kadang datanya belum update. Jadi, misalnya di Kecamatan A belum diverifikasi dan validasi. Misalnya di Kecamatan A, menurut data jumlahnya 200 terus setelahnya ternyata di lapangan udah gak 200 lagi. Ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang tidak masuk sasaran lagi atau kebalikannya 200 ternyata di lapangan ada 250. Ntah ada yang baru masuk, ada yang baru melahirkan seperti itu. Itu kendalanya sih lebih sering seperti itu” (IU-2)

“alhamdulillah sampai saat ini enggak ada ya ha. Kalau hambatannya itu tadi ya kadang dari keluarganya ngeyel. Tapi alhamdulillah itu hanya sedikitlah hanya berapa persen aja. Itu ajanya” (IU-3)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci menyatakan bahwa hambatan dalam implementasi (pelaksanaan) program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting tersebut yaitu terlalu banyaknya TPK dan masalah dana yang terbatas. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“hambatannya yaitu mungkin terlalu banyak tim TPK nya, mungkin anggarannya jugak tidak terlalu banyak ya. dengan anggaran bantuan dana dari DAK dari pusat itu seperti pertim itu hanya pemberiannya pulsananya cuma serratus ribu perbulan, tapi alhamdulillahnya TPK nya itu tetap bekerja” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan program tersebut adalah terlalu banyaknya TPK sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka dalam satu tempat, masalah anggaran yang tidak terlalu banyak dan pendataan yang kurang update.

6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan wawancara dengan informan utama, terungkap bahwa untuk mengatasi kendala dalam program tersebut, dilakukan upaya dengan melakukan verifikasi dan validasi agar data yang dihasilkan paling update dan paling teraktual. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“ya kami jugak ada skrining jugala kembali kalok misalnya gaada petugasnya memang gaada orangnya ya memang gak bisa dilaporkan kan dek. Karena kan dimasukkan ke aplikasi Elsimil kek gitu. Jadi, kalok misalnya nanti ada koordinasi, ada pemantauan pengevaluasian dari atas, pusat atau provinsi ya kita jelasin kenapa pencapaiannya gak maksimal ya karena memang pervalnya kemaren itu memang tidak semua di perval gitu. Tapi tahun 2024 pervalnya udah di 21 kecamatan sih” (IU-1)

“kalau upayanya setiap tahun kita melakukan verifikasi dan validasi. Jadi, verifikasi dan validasi data pendataan keluarga dilakukan tiap tahun tujuannya supaya data yang dihasilkan di lapangan itu adalah data yang paling update data yang paling teraktual” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi (pelaksanaan) program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting tersebut yaitu dengan mensinkronkan data dengan aplikasi Elsimil yang ada tersebut sehingga data yang dihasilkan diharapkan akan baik. hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“mensinkronkan data dengan aplikasi Elsimil tersebut” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh bidang Keluarga Sejahtera Dinas P3APMP2KB Kota Medan unruk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut adalah dengan mensinkronkan data dengan aplikasi Elsimil tersebut.

7. Waktu pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dengan informan utama, dapat disimpulkan bahwa Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut dilaksanakan sebanyak 10 kali dalam setahun sesuai JUKNIS yang ada. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“Itu di Juknis itu 10 kali ya. Sepuluh kali dalam setahun. Jadi, dalam satu bulan itu merencanakan kita kan kerjanya berdasarkan target nih berdasarkan target.

Kalau misalnya ada ya ntah berapa yang melakukan 80.000 KRS misalnya disitu ya. Jadi 80.000 KRS itu yang memang harus didatangi sama TPK kita kayak gitu” (IU-1)

“ sebanyak 10 kali dalam setahun” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan informan kunci menyatakan bahwa program pendampingan keluarga resiko Stunting tersebut dilaksanakan setiap bulan (10 kali dalam setahun). Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“program ini setiap tahunnya dilaksanakan terus, dimana ada sasarannya TPK harus turun untuk mendampingi sebanyak-banyaknya mendampingi sasaran kita. Jadi kalau setiap hari mau turun ya boleh terserah tim TPK nya lah” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa program pendampingan keluarga risiko stunting tersebut selalu dilaksanakan setiap bulannya dalam satu tahun.

d. Disposisi

1. Kecekatan dan kesediaan petugas/pelaksana Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

Berdasarkan hasil interaksi dengan informan kunci, dapat disimpulkan bahwa petugas/pelaksana Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut harus selalu bersedia dan cekatan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“haruslah dek” (IU-1)

“wajib bersedia tim TPK tersebut” (IU-2)

Berdasarkan hasil triangulasi sumber yaitu informan kunci yang menyatakan bahwa petugas/pelaksana program pendampingan keluarga resiko Stunting tersebut sampai saat ini bersedia untuk melakukan tugasnya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“sampai saat ini mereka memang siap selalu mendampingi hanya saja mungkin karena terkendala dilaporannya yang aplikasi terkadang lagi heng gitu. Sampai saat ini bersedia” (IK-1)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Pendamping Keluarga risiko stunting tersebut harus selalu mau dan siap dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Implementasi Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan

No.	Aspek	Temuan	Hambatan
1.	Sumber daya	Sumber Daya dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga risiko stunting di Kota Medan ini sudah cukup baik. Dalam program tersebut sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut sudah cukup yaitu ada 1.116 tim yang tersebar di 21 kecamatan yang terdiri dari satu tim ada 3 orang yaitu Kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan yang aktif dalam melaksanakan program tersebut. Sarana dan prasarana serta pendanaan juga sudah mencukupi seperti tersedianya fasilitas kesehatan di daerah tersebut dan adanya bantuan dana berupa pulsa setiap bulannya untuk TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan program	Dana yang tersedia dari Dana Alokasi Khusus terbatas sehingga sulit untuk mengumpulkan semua TPK dalam satu lokasi untuk diberikan informasi secara langsung.

		pendampingan keluarga resiko stunting tersebut.	
2.	Komunikasi	Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut sudah cukup baik dan koordinasinya dilakukan secara berjenjang dari Bidang KS DP3APMP2KB Kota Medan kepada Tenaga Lini Lapangan, lalu Tenaga Lini Lapangan tersebut menginformasikan kepada TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat (sasaran).	Sulitnya untuk mengumpulkan TPK dalam 1 tempat karena jumlahnya yang banyak.
3.	Struktur birokrasi	Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut sudah cukup baik yang mana para pelaksana program sudah menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Dalam pelaksanaan program ini memang belum memiliki SOP, namun ada JUKNIS dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting ini. Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, walaupun	Pendataan Keluarga Resiko Stunting yang kurang baik dan belum dilakukannya monitoring serta evaluasi pada program tersebut pada tahun ini.

		masih ada sedikit hambatan seperti pendataan Keluarga Resiko Stunting yang belum diupdate, dana yang terbatas, dan belum dilakukannya monitoring serta evaluasi pada program tahun ini. Namun, para pelaksana program tetap melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut seperti dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang agar data KRS yang dihasilkan adalah data yang paling update.	
4.	Disposisi	Disposisi dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga resiko stunting di Kota Medan tersebut sudah cukup baik. Pelaksana program tersebut harus selalu bersedia dan cekatan dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.	Tim Pendamping Keluarga harus selalu bersedia menjalankan tugasnya masing-masing.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sumber Daya

Jika pelaksana program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya maka program akan sulit untuk terlaksana dengan lancar. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan,

serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai gambaran sumber daya dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga resiko stunting di Kota Medan ini sudah cukup baik. Dalam program tersebut sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut sudah cukup yaitu ada 1.116 tim yang tersebar di 21 kecamatan yang terdiri dari satu tim ada 3 orang yaitu Kader TP PKK , Kader KB, dan Bidan yang aktif dalam melaksanakan program tersebut. Sarana dan prasarana serta pendanaan juga sudah mencukupi seperti tersedianya fasilitas kesehatan di daerah tersebut dan adanya bantuan dana berupa pulsa setiap bulannya untuk TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan program pendampingan keluarga resiko stunting tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2023) yang mengatakan bahwa Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan (Pratiwi, 2023).

Allah telah menjelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sumber daya hendaknya melalui hikmah, sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl ayat 125 sebagai berikut.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad mengenai cara berdakwah (penyampaian/ajakan) yang menekankan hikmah. Hikmah memiliki beberapa arti, yaitu pengetahuan tentang faedah dan rahasia sesuatu, perkataan tepat yang dijadikan argumen, mengetahui hukum-hukum Al-Quran, memperlihatkan contoh yang baik, dan takut kepada Allah SWT. Islam, dengan hikmah juga berarti tegas, benar, serta bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka, yaitu siapa pun yang menolak, menentang, atau meragukan seruanmu, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Yang Maha Memberi petunjuk dan bimbingan, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan menyimpang dari jalan-Nya, dan Dialah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang benar.

Dalam pelaksanaan suatu program tidak akan jauh dari berbagai permasalahan kinerja petugas dan penganggaran dana yang menunjang keberlangsungan program serta capaiannya, apabila tidak tercukupinya dana penganggaran suatu program maka tentu saja program tersebut tidak akan mampu terlaksanakan dengan lancar dan baik sesuai yang diharapkan.

4.3.2 Komunikasi

Pelaksanaan program akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila apa yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh pihak atau lembaga yang bertanggung jawab dan sesuai dengan target sasaran, sehingga dalam pelaksanaan

suatu program haruslah dijalankan oleh pihak-pihak yang memang mampu dan sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai gambaran komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga resiko stunting di Kota Medan tersebut sudah cukup baik dan koordinasinya dilakukan secara berjenjang dari Bidang KS DP3APMP2KB Kota Medan kepada Tenaga Lini Lapangan, lalu Tenaga Lini Lapangan tersebut menginformasikan kepada TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat (sasaran). Komunikasi yang dilakukan harus jelas dan melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2023) yang mengatakan bahwa Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat (Pratiwi, 2023).

Allah SWT telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikoordinasikan dengan kompak, disiplin dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ash-Shaf ayat 4 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورًا

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya untuk membela diri dan membela kehormatan Islam dan kaum muslim dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik; mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim yang satu terhadap komponen umat muslim lainnya.

Agar komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu program dapat sesuai dan selaras dengan kebijakan yang dibuat, maka diperlukan adanya pengawasan dan juga komunikasi yang kuat dan kokoh antara lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga resiko stunting tersebut.

4.3.3 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Kurangnya struktur birokrasi dalam suatu implementasi program akan menyebabkan program tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Terdapat dua aspek struktur birokrasi yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan atau program, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu bidang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai gambaran struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di Kota Medan tersebut sudah cukup baik yang mana para pelaksana program

sudah menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Dalam pelaksanaan program ini memang belum memiliki SOP, namun ada JUKNIS dalam pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting ini. Program Pendampingan Keluarga Resiko Stunting ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit hambatan seperti pendataan Keluarga Resiko Stunting yang belum diupdate, dana yang terbatas, dan belum dilakukannya monitoring serta evaluasi pada program tahun ini. Namun, para pelaksana program tetap melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut seperti dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang agar data KRS yang dihasilkan adalah data yang paling update.

Dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga risiko stunting tersebut Kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan yang ditugaskan sebagai pelaksana program di lapangan yang mana Bidan bertugas sebagai koordinator dan pemberi pelayanan kesehatan di lapangan. Dalam melaksanakan program di lapangan Bidan dan TPK lainnya bertugas untuk memberi informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai cara untuk meningkatkan gizi ibu hamil, memberikan makanan tambahan dan tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2023) yang mengatakan bahwa Upaya yang dilakukan dalam pencegahan stunting adalah pendampingan keluarga yakni kegiatan yang meliputi kegiatan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan akses informasi dalam pelayanan kesehatan pada keluarga yang memiliki risiko stunting dengan sasaran prioritas yakni ibu hamil, ibu pasca melahirkan, anak usia 0-59 bulan dan semua calon

pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting (Hasanah et al., 2023).

Struktur Birokrasi merupakan garis depan sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu memahami hakekat dari tugas yang diembannya. Oleh karenanya, maka didalam menjalankan tugas kesehariannya, perlu menjadikan sifat rasulullah sebagai uswatun hasanah (suri teladan yang baik). Di dalam agama Islam, tokoh yang dapat dijadikan suri teladan yang baik adalah Rasulullah saw. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۗ

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Rasulullah adalah teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di medan perang. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu dalam semua ucapan dan perilakunya, baik pada masa damai maupun perang. Namun, keteladan itu hanya berlaku bagi orang yang hanya mengharap rahmat Allah, tidak berharap dunia, dan berharap hari Kiamat sebagai hari pembalasan, dan berlaku pula bagi orang yang banyak mengingat Allah karena dengan begitu seseorang bisa kuat meneladani beliau.

Dalam suatu implementasi (pelaksanaan) program, semua orang yang terlibat dalam melaksanakan program tersebut diharapkan dapat mencontoh sifat

Rasulullah yang menjadi suri teladan (contoh yang baik). Seseorang diharapkan hanya mengharap rahmat dari Allah bukan hanya berharap dunianya saja. Para pelaksana program juga hendaknya ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

4.3.4 Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat didukung sikap dari pelaksana. Pelaksana yang memiliki sikap positif terhadap suatu kebijakan atau program akan memastikan bahwa kebijakan atau program dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan. Pelaksana kebijakan atau program tidak hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan atau program.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai gambaran disposisi dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga resiko stunting di Kota Medan tersebut sudah cukup baik. Pelaksana program tersebut harus selalu bersedia dan cekatan dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2023) yang mengatakan bahwa disposisi merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana

kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Pratiwi, 2023).

Program bisa berjalan dengan baik karena adanya kemauan dan rasa tanggung jawab pelaksana program tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Muddassir ayat 38 sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Ayat berikut merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah ditegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing, kecuali golongan kanan golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik.

Dalam implementasi (pelaksanaan) suatu program para pelaksana program harus memiliki kemauan dan rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya, baik itu sebuah kebaikan atau bahkan kejahatan. Setiap manusia pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah dilakukannya tersebut.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu ada pada keterbatasan waktu dari peneliti, sehingga peneliti hanya mampu meneliti Kecamatan Belawan sebagai sampel dari Kota Medan dan peneliti menjadikan Ibu yang memiliki Balita

sebagai sampel tidak melibatkan PUS, calon pengantin dan ibu hamil dalam penelitian.

